PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DAERAH PEDESAAN

(Studi kasus di Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo)

JURNAL

HARIYANTO RISALDI SAINI
NIM. D01418016

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2022

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DAERAH PEDESAAN (STUDI DI DESA LAMAHU KECAMATAN BILATO KABUPATEN GORONTALO)

Hariyanto Risaldi Saini[1], Joice Machmud[2], Nur Eng Mokodompit[3]
[1)]Sarjana Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Tahun 2022.
[23)]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
Email: ical.saini@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of BUMDES in improving the economy of communities in rural areas (Study in Lamahu Village, Bilato District, Gorontalo Regency). The research method used is with a qualitative approach and descriptive type of research. The results of the study are: of the 5 aspects or indicators of the role of BUMDes in improving the community's economy, it has not fully played a good role. In the aspect of building and developing the potential and economic capabilities of the village community, it is found that the business run by BUMDes is currently not in accordance with the potential of the village; In the aspect of playing an active role in efforts to improve the quality of human life and society, it is obtained that this aspect can be socially helpful but economically it has not been able to play a role; In the aspect of strengthening the people's economy as the basis for the strength and resilience of the national economy with BUMDes as the foundation, it is found that BUMDes currently have limited capital that is only exhausted in meeting consumable needs; In apsek trying to realize and develop the economy of the village community, obtained by the limitations of BUMDes so that it is difficult to develop businesses related to the potential of the village: and in the aspect of helping the community to increase their income so as to increase the income and prosperity of the community, it was found that Bumdes was only able to help the community in the sale of RO refill water, procurement of ATK and photocopies for students.

Keywords: *Bumdes, Role, Community Economy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana Peran BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Daerah Pedesaan (Studi di Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo). Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian adalah: dari 5 aspek ataupun indikator peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya berperan dengan baik. Pada aspek Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, didapatkan bahwa usaha yang dijalankan oleh BUMDes saat ini belum sesuai dengan potensi desa; Pada aspek berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, didapatkan pada aspek ini secara sosial dapat membantu namun secara ekonomi belum bisa berperan; Pada aspek memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, didapatkan bahwa BUMDes saat ini memiliki keterbatasan modal yang hanya habis dalam memenuhi kebutuhan habis pakai saja; Pada apsek berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, didapatkan dengan adanya keterbatasan yang dimiliki BUMDes sehingga sulit untuk mengembangkan usaha yang terkait dengan potensi desa: dan pada aspek membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat, didapatkan bahwa Bumdes hanya mampu membantu masyarakat dalam penjualan air isi ulang RO, pengadaan ATK dan fotocopy bagi siswa.

Kata Kunci: Bumdes, Peran, Perekonomian Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah telah dirumuskan dalam GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara yang telah diganti dengan Propenas (Program Pembangunan Nasional) yang berlandaskan UU Nomor 25 tahun 2000, ideologi Pancasila dan konstusional UUD 1945 tentang pembangunan nasional akan berkaitan secara langsung dengan proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita dalam Todaro & Smith (2011). Dengan pembangunan diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat ke arah lebih baik. Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, bukan segelintir kelompok atau orang saja.

Membangun Indonesia dari pinggiran itu berarti desa harus dibangun karena sebagian besar penduduk Indonesia ada didesa. Masyarakat desa harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat desa diberi kewenangan untuk dapat mendefenisikan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa harus menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa. Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan di Desa. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Sejak dimulainya program Dana Desa, pemerintahan dan masyarakat mengutarakan begitu banyak harapan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur dan sektor padat karya yang bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Program ini juga diharapkan dapat menjadikan desa sebagai pilar penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan dan ketertinggalan. Dana Desa dalam kebijakan Jokowi-JK sangat berkembang pesat dan terus meningkat. Dengan adanya Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dengan cara memanfaatkan potensi desa sehingga akan meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat desa. Pada era Jokowi-JK Dana Desa memiliki tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi Ekonomi Pembangunan tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut (Kemendes PDTT, 2016). Secara teknis, Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada Pasal 18 yang menerangkan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)

Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan (Amri, 2015: 295-299). Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Pembangunan perdesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan (Kasiyanto, 2004: 55)

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

BUMDES merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. BUMDES diatur di dalam pasal 213 ayat (1) UU Nomor. 23 Tahun 2014, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Kamaroesid, 2015: 2).

Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kamaroesid, 2015: 2).

Berkenaan dengan penelitian terkait dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah ada penelitian sejenis yang dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Eddy Yusuf Agunggunanto, dkk (2016) yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mahbub Junaidi (2016) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah berjalan lancar.Namun masih sedikit saja ada kendala yang masih belum bisa diatasi dengan baik.Meskipun tujuan agar sesuai dengan yang diinginkan, kendala diantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, serta insfrastrukturnya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dantika Ovi Era Tam dan Yanuardi, M. Siyang (2015) yang berjudul Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil member dampak positif bagi peningkatan perekonmian Desa dan Kesahteraan Masyarakat meskipun UnitUnit yang ada dalam BUMDESbelum berjalan secara keseluruhan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara yang ditulis oleh Khairul Amri yang berjudul Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dengan sifat penelitian Deskriptif Kualitatif yang menggunakan Snowballing Sampling serta teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program BUMDES secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal.

Observasi awal yang dilakukan oleh didapatkan bahwa BUMDES di Desa Lamahu Kecamatan Bilato yang telah diberdiri sejak 4 tahun yang lalu itu dianggap tidak memberikan kontribusi yang jelas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, padahal tujuan dibentuknya BUMDES salah satunya adalah bagaimana masyarakat yang ada di wilyahnya dapat meningkat ekonomi dan kesejahteraannya. Hal lain yang ditemukan pada saat dilakukan observasi adalah usaha bisnis yang di laksanakan oleh BUMDES adalah hanya usaha bisnis pengisian air minum (RO), Fotokopi dan ATK, hal ini pula yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, harapan masyarakat adalah bahwa BUMDES mampu menciptakan unit bisnis yang menjadi kebutuhan masyarakat misalnya seperti: pengadaan pupuk, pengadaan bibit pertanian dan hal-hal yang menyangkut kebutuhan

masyarakat berdasarkan profesi yang dijalankan yakni rata-rata berprofesi sebagai petani dan pekebun.

KAJIAN LITERATUR

1. Kosep Peran

Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya (Ahmadi, 2004:39).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:220).

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pengertian Badan Usaha Milik Desa Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamaroesid, 2015: 2).

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "*goodwill*" dalam merespon pendirian BUMDes (Dewi, 2012). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masayrakat dalam rangka memperolah keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah (Kamaroesid, 2015: 8)

1) Meningkatkan perekonomian desa
2) Meningkatkan pendapatan asli desa
3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Menurut Seyadi (2003:16) peranan BUMDes adalah sebagai berikut:

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

3. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga (Depdiknas, 2017: 854).Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan, pengembangan maupun distribusi (Sholahuddin, 2007: 3).

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem.Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur- unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan komplek sifatnya.Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu (Deliarnov, 2009: 2).

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional (Sukalele, 2014: 5).

Ekonomi masyarakat berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2015). Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (UU No. 11 Tahun 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor *dalam* Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah :
   - Kepala Desa 1 orang
   - Sekretaris Desa 1 orang
   - Pengelola BUMDES 3 orang
   - Masyarakat 3 orang
b. Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakanya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

1. Observasi; bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati.
2. Wawancara; Esterberg *dalam* Sugiyono (2007:211), mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut.
3. Dokumentasi; merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2007:213). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan.Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang

diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Tidak ada kontribusi nyata BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan 2) BUMDes tidak mampu menciptakan usaha yang mendukung profesi masyarakat, BUMDes hanya menciptkan bisnis musiman. Kedua masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis dituangkan dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan teori yang dikemukakan oleh Seyadi (2003:16)) dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bagaimana Peran Bumdes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pedesaan (Studi di Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo). Pada bagian ini akan diuraikan analisis hasil penelitian dari data yang diperoleh. Adapun hal-hal yang dibahas yaitu tentang Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pedesaan sebagaimana yang di kemukakan oleh Sayedi (2003:16). Pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a) **Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.**

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada Pemerintah Desa Lamahu didapatkan bahwa BUMDes yang ada di Desa Lamahu Kecamatan Bilato mengembangkan usaha belum mampu dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa. Dimana Bumdes yang masih terfokus pada masalah organisasinya serta tidak menjalankan usaha yang mampu mendorong potensi ekonomi masyarakat desa. Demikian pula disampaikan oleh pengelola BUMDes, dimana bahwa Bumdes belum mampu dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa. Dimana saat ini Bumdes hanya melakukan usaha pengisian air RO, penjualan ATK dan fotocopi. Dimana kegiatan usaha tersebut tidak mampu mendorong dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa karena tidak berkesesuaian dengan potensi dan profesi dari masyarakat des aitu sendiri.

Selanjutnya dilihat dari sisi usaha yang dijalankan oleh Bumdes didapatkan bahwa Bumdes yang ada di Desa Lamahu Kecamatan Bilato dalam mengembangkan usaha terkait dengan kebutuhan pokok dan jasa masyarakat seperti pengisian air minum RO, penyediaan ATK serta fotocopy. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo (2019), Desa Lamahu Kecamatan Bilato potensi desanya adalah di bidang perkebunan dan pertanian. Sehingga usaha ini dipandang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam peningkatan perekonomian mereka. Namun sisi lain mengatakan bahwa dari hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan kepada informan yang berasal dari unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo didapatkan bahwa BUMDes belum mampu berperan dalam Membangun dan mengembangkan potensi dan

kemampuan ekonomi masyarakat Desa Lamahu Kecamatan Bilato, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Pada aspek ini BUMDes Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo belum memiliki peranan yang signifikan dibuktikan dengan hanya ada satu usaha yang dimiliki oleh BUMDes dan usaha tersebut belum sesuai dengan potensi dari desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, Desa Lamahu Kecamatan Bilato potensi desanya adalah pada perkebunan dan pertanian. Jika mengacu pada data BPS tersebut, seharusnya BUMDes Desa Lamahu Kecamatan Bilato mendirikan usaha yang terkait dengan usaha perkebunan dan pertanian misalnya sarana produksi pertanian (saprodi), unit simpan pinjam ataupun usaha-usaha lainnya yang terkait dengan biodang perkebunan dan pertanian.

b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan menjadi penyokong ekonomi desa, BUMDes diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat desa yang kualitas kehidupannya yang tinggi. Kualitas kehidupan tersebut menyangkut kualitas kehidupan dibidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Dari hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan kepada informan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini didapatkan bahwa BUMDes belum mampu dalam Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat di Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan dari Bumdes itu sendiri sehingga pengelola Bumdes hanya mampu mengurus rumah tangganya saja. Sehingga dalam kegiatan usaha yang dijalankan saat ini yakni pengisian air minum RO, penyediaan ATK serta fotocopy dianggap sebagai sebuah usaha yang kontribusinya terlalu kecil jika dilihat dari kegiatan yang sehausnya dilakukan oleh BUMDes, selain itu kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes hanya terlihat sebagai usaha musiman saja serta kebanyak usaha habis dalam tahap perencanaan saja.

c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.

Konsep BUMDes adalah memperkokoh perekonomian rakyat dikarenakan pelaksanaanya diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaanya ditujukan guna memperkuat ketahanan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut Sumodiningrat dalam Mardi (2000: 6) perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian rakyat merupakan perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamaroesid, 2015: 2). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa Sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, BUMDes diharapkan menjadi pondasi yang mampu menggerakan aspek-aspek ekonomi di desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan kepada para informan yang dipilih dalam penelitian bahwa BUMDes di Desa Lamahu Kecamatan Bilato

Kabupaten Gorontalo belum mampu berperan Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya. Hal ini dapat dilihat bahwa selain BUMDes hanya memiliki usaha pengisian air minum RO, penyediaan ATK serta fotocopy, BUMDes juga belum mampu menggerakan ekonomi masyarakat dikarenakan adanya keterbatasan modal yang dimiliki serta Bumdes hanya berfokus pada bagaiman mencari keuntungan bagi dirinya sendiri saja.

d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Salah satu harapan dari kehadiran BUMDes sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yakni adanya pengembangan ekonomi masyarakat desa. Harapannya adalah BUMDes yang pengelolaannya dilakukan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat adalah mampu menjadi fasilitator dalam mengembangkan perekonomian di desa sehingga masyarakat akan ikut terdampak atas pengembangan ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada para informan bahwa BUMDes di Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo belum mampu berperan Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDes dimana modal tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan habis pakai seperti ATK.

Namun dengan usaha yang dimiliki saat ini yang pengisian air minum RO, penyediaan ATK serta fotocopy dianggap telah mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Seperti misalnya penyediaan ATK bagi anak-anak sekolah serta fotocopy yang membantu masyarakat ataupun anak sekolah dalam menggandakan dokumen tanpa harus keluar dari desa.

Persoalan yang didapatkan juga bahwa Bumdes saat ini jika dilihat dari sisi sumber daya manusia telah dapat membantu masyarakat dalam pekerjaan. Dimana beberapa masyarakat di rekrut menjadi karyawan pada usaha-usaha yang dibangun ataupun yang dijalankan oleh Bumdes.

e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Peningkatan penghasilan dalam kemakmuran masyarakat merupakan tujuan akhir pada suatu organisasi maupun perusahaan. BUMDes merupakan lembaga yang berbasis pada perekonomian rakyat dan perekonomian kreatif. Perekonomian rakyat merupakan sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan sedangkan perekonomian kreatif faktor pendukung perekonomian rakyat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masayarakat dalam rangka memperolah keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Dari pengertian ini bahwa BUMDes harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan desa sehingga dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dan desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada para informan bahwa BUMDes di Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo belum mampu berperan dalam Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa usaha yang dijalankan oleh Bumdes tidak bersentuhan langsung dengan profesi masyarakat yang ada di

Desa Lamahu yang rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani jagung. Selain itu juga Bumdes dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola Bumdes sehingga kegiatan Bumdes hanya itu-itu saja.

Namun demikian, yang perlu diapresiasi bahwa usaha Bumdes yang dijalankan saat ini telah membantu masyarakat dalam mendapatkan keuntungan dari hasil selisih jual dengan harga yang diberikan oleh Bumdes. Sehingga hal ini dianggapa sebagai kontribusi yang dilakukan oleh bumdes kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Lamahu Kecamatan Bilato dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo belum mampu berperan sesuai dengan peranannya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, terkait dengan Peran BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Daerah Pedesaan (Studi di Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa dari 5 aspek ataupun indikator peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya berperan dengan baik. Pada aspek Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, didapatkan bahwa usaha yang dijalankan oleh BUMDes saat ini belum sesuai dengan potensi desa; Pada aspek berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, didapatkan pada aspek ini secara sosial dapat membantu namun secara ekonomi belum bisa berperan; Pada aspek memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, didapatkan bahwa BUMDes saat ini memiliki keterbatasan modal yang hanya habis dalam memenuhi kebutuhan habis pakai saja; Pada apsek berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, didapatkan dengan adanya keterbatasan yang dimiliki BUMDes sehingga sulit untuk mengembangkan usaha yang terkait dengan potensi desa: dan pada aspek membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat, didapatkan bahwa Bumdes hanya mampu membantu masyarakat dalam penjualan air isi ulang RO, pengadaan ATK dan fotocopy bagi siswa.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa selaku *ex-officio* (Penasehat) dari BUMDes harus lebih detail memberikan saran dan masukan ke pengurus BUMDes untuk melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan kontribusi (PAD) bagi desa;
2. Pengurus BUMDes harus mampu menciptakan usaha-usaha yang lebih mendukung pada profesi masyarakat serta potensi dari desa. Sehingga usaha yang ada tersebut mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu. 2004. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta

Amri Jahi. 2006. Aksi Sosial dalam Pembangunan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor

Dantika Ovi Era Tam dan Yanuardi, M. Siyang. 2016. Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013

Deliarnov, 2009. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers

Dewi, Amelia Kusuma. 2014. Journal of Rural and Development. Vol. 5 No. 1, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Penadapatan Asli Desa serta Menumbuhkan Perekonomian Desa

Eddy Yusuf Agunggunanto, dkk. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Kamaroesid Herry, 2015. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, Jakarta: Mitra Wacana media

Kasiyanto. 2009. Efektivitas Kerjasama Jaringan Informasi Antar Lembaga Pemerintah Di Propinsi Jawa Timur. Jurnal KomMTI Vol: 3 No. :8. ISSN 1978-5518. Surabaya: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya

Mahbub Junaidi. 2016. Evaluasi Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi

Moleong, Lexy J. 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tenta

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa

Sholahudin, Muhammad dan Lukman Hakim. 2012. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Seyadi. 2003. BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN

Sodiq, Amirus. 2015. Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2009 – 2014. Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. Retrieved From journal.stainkudus.ac.id

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafmdo Persada.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sukalele, Daniel, 2014. Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diaksestgl.

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. “Pembangunan Ekonomi”. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial